

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Implementasi Kebijakan

A. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Kebijakan merupakan suatu konsep yang dibuat untuk mengatur sesuatu dalam mencapai suatu rencana yang telah ditetapkan. Berbicara tentang kebijakan sangatlah erat dengan aturan yang harus dilakukan oleh eksekutornya. Namun kebijakan menentukan suatu arah, ketika dalam pembuatan kebijakan tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan harus dikaji dengan baik, sehingga dalam pengimplementasiannya tidak menyimpang dari masalah yang ingin diselesaikan. Adapun pendapat lain tentang kebijakan oleh Kariawati, N dan Rahmadani sebagai berikut:

“Menurut Karniawati, N dan Rahmadani, R, Kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat.” (Karniawati, N dan Rahmadani, R, 2011:237)”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tindakan atau keputusan ini memiliki dampak dan pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga politik. Kebijakan tersebut mencerminkan prioritas dan tujuan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut searah dengan pendapat mengenai kebijakan yang dikatakan oleh Carl Friedrich dalam bukunya “*Man His Government*” yang mengemukakan

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (Friedrich, 1963:79)

Berdasarkan pernyataan di atas merujuk pada rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan ini bisa mencakup situasi sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan fisik. Pada umumnya, kebijakan diusulkan sebagai respons terhadap hambatan-hambatan atau kesulitan yang ada dalam lingkungan tersebut, serta untuk memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan yang ada. Tujuan utama dari mengusulkan kebijakan adalah untuk mengatasi tantangan atau

kesulitan tersebut dan mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan adalah rencana aksi yang dirancang untuk menghadapi permasalahan yang ada serta mengambil manfaat dari peluang yang ada dalam lingkungan tertentu. Tujuan akhirnya adalah mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan. Adapun pendapat lain tentang kebijakan menurut Edi Suharto dalam bukunya Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik bahwa

“kebijakan merupakan sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik” (Suharto, 2008:03).

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa sebuah alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintahan. Namun, konsep ini tidak hanya terkait dengan aspek aparatur negara atau struktur pemerintah, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya publik secara lebih luas. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada administrasi pemerintahan dan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, tetapi juga melibatkan manajemen dan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, seperti lahan, energi, lingkungan, dan lainnya. Dengan kata lain, kebijakan memiliki dampak yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang ada. Adapun pendapat lain tentang kebijakan publik menurut Wiliiam N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.” (Dunn, 2003:132)

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa Kebijakan Publik sebagai suatu pola kompleks dari berbagai pilihan kolektif yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Pilihan-pilihan ini mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta keputusan-keputusan untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Kebijakan Publik melibatkan proses pengambilan keputusan oleh badan atau kantor pemerintah yang mencakup berbagai opsi dan alternatif. Dengan demikian, Kebijakan Publik bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga tentang apa yang tidak dilakukan. Pernyataan ini mengakui kompleksitas dan ketergantungan antara berbagai pilihan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

B. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Implementasi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan baik dilakukan secara bersama-sama maupun individu. Dalam melakukan berbagai hal, perlu adanya implementasi yang mewujudkan suatu rencana untuk menjadi kenyataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rencana yang dibuat namun pengimplementasiannya minim, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Ketika kita berbicara tentang pemerintahan, disitu dapat kita ketahui secara mudah bahwa

pengimplementasian dalam suatu kebijakan ada yang sedikit melaksanakan namun juga ada yang melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan aturannya. Berbicara tentang pengimplementasian ada beberapa menurut para ahli yang memberikan definisi.

Menurut Agustino Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Agustino, 2008:138). Hal ini sejalan dengan pendapat Leo Agustino yaitu sebagai berikut:

“Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.” (Agustino, 2008:139).

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa implementasi adalah suatu proses yang bergerak dan terus berubah, di mana para pelaksana kebijakan melakukan berbagai aktivitas atau tindakan. Hasil dari aktivitas ini diharapkan akan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada bagaimana kebijakan atau rencana diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan bagaimana hasilnya diperoleh sesuai dengan arah yang diinginkan. Proses ini bisa melibatkan berbagai dinamika, perubahan, dan adaptasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun pendapat lain mengenai Implementasi yaitu dari Mulyadi (2015:12) yang menyatakan bahwa:

“Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola

operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.” (Mulyadi, 2015:12).

berdasarkan pengertian di atas, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan mencapai perubahan baik yang besar maupun kecil sesuai dengan keputusan tersebut. Implementasi juga melibatkan upaya pemahaman mengenai apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana program tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penting dalam menerapkan kebijakan atau program dalam praktik, yang melibatkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan dan memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun implementasi menurut Wiliam dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum dikutip dari (Taufik dan Isril, 2013:136) bahwa:

"Penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Taufik dan Isril, 2013:136)

Berdasarkan pendapat di atas bahwa penelitian dalam implementasi bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan suatu organisasi dalam mengumpulkan orang-orang dan sumber daya materi secara bersatu dalam sebuah unit organisasi. Penelitian ini juga berfokus pada upaya organisasi untuk mendorong anggota-

anggotanya untuk mencari cara yang efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dalam konteks ini, penelitian implementasi membahas bagaimana organisasi mengelola dan mengoordinasikan berbagai elemen yang terlibat dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang terpadu dan efisien.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga. Implementasi suatu kebijakan atau peraturan tentunya dapat dikatakan berhasil, ketika pengimplementasiannya terealisasi sesuai dengan peraturan dan tujuan awal yang hendak dicapai. Pengimplmentasian suatu kebijakan dalam instansi pemerintahan tentunya bukan hanya satu orang saja yang melaksanakannya, akan tetapi sautu kelompok, sehingga ada hubungan di dalamnya yaitu kerjasama antar satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Menurut Nugroho implementasi kebijakan adalah:

“Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.” (Nugroho, 2003:158)

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa ketika hendak mengimplementasikan suatu kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat

diambil. Pendekatan pertama adalah dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara langsung melalui pembentukan program-program atau inisiatif konkret. Pendekatan kedua adalah dengan merumuskan kebijakan tersebut ke dalam bentuk turunan atau derivat yang lebih spesifik, yang kemudian diimplementasikan. Dengan kata lain, pilihan pertama mencakup pelaksanaan kebijakan dengan menciptakan langkah-langkah nyata seperti program-program, sementara pilihan kedua melibatkan membuat bentuk turunan atau variasi dari kebijakan sebelum mengimplementasikannya. Pilihan antara keduanya dapat dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan, faktor ekonomi, sosial, dan politik, serta konteks di mana kebijakan akan dijalankan. Adapun pendapat lain dari Tachjan yaitu:

“Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika topdown maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro” (Tachjan, 2006:25).

Berdasarkan pernyataan di atas Implementasi kebijakan publik adalah langkah administratif yang dilakukan setelah kebijakan telah dibentuk dan disetujui. Proses ini berada di antara tahap perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, yang berarti mengubah atau menerjemahkan opsi-opsi yang masih bersifat abstrak atau umum menjadi opsi-opsi yang lebih konkret atau spesifik. Adapun implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono yaitu:

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”. (Indiahono, 2009:143)

Berdasarkan pernyataan di atas Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Tahap ini berperan dalam menilai apakah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dapat dijalankan dengan efektif di lapangan dan berhasil menghasilkan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Istilah "output" merujuk pada hasil konkret atau produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Output ini biasanya dapat diamati atau diukur dalam waktu relatif singkat setelah implementasi kebijakan dimulai. Sedangkan "outcome" mengacu pada dampak yang lebih luas atau perubahan yang diharapkan terjadi akibat pelaksanaan kebijakan. Outcome mungkin terjadi setelah output muncul atau bahkan dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama setelah implementasi kebijakan selesai. Dengan kata lain, implementasi kebijakan melibatkan menjalankan dan mewujudkan rencana kebijakan dalam praktik, dan hasil dari implementasi ini dapat berupa hasil langsung (output) serta perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan (outcome) dalam jangka panjang.

Implementasi merujuk pada proses penerapan kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh suatu pemerintah atau organisasi. Implementasi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan

dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Setelah itu, dilakukan perencanaan dan pengorganisasian untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan atau program dengan mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus dan dapat mengalami kendala di berbagai tahapan. Kendala yang mungkin terjadi antara lain perbedaan pemahaman atau persepsi, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar sektor atau unit, dan resistensi dari pihak-pihak yang terdampak atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan mengadopsi strategi yang tepat untuk mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut dapat mencapai tujuan dan sasarnya dengan efektif dan efisien.

Implementasi menurut George C Edwards III (dalam Subarsono 2008 :94) dapat dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach*. Edward III (dalam Subarsono 2008:94) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok, yakni:

faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?

1. faktor apa yang menghambat keberhasilan kebijakan implementasi kebijakan? (Subarsono 2008:94)

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi,

sumberdaya, sikap birokrasi / pelaksana dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Edward III (dalam Arifin 2014: 61) mengemukakan.

“ In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the precondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?”

“Dalam pendekatan kami terhadap studi implementasi kebijakan, kami memulai dari yang abstrak dan bertanya: apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan?” (Arifin 2014: 61)

setidaknya George C. Edward III mengatakan bahwa didalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagian pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edward III (dalam Zaini dan Hafis 2015:69) dinamakan dengan *“Direct and indirect impact of implementation.”* Dalam pendapat ini, Edward III (1980, dikutip dari Agustino 2022: 154-158) menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus tepat, akurat

dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) Transmisi atau penyalur komunikasi, yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi atau salah pengertian sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terdistorsi saat sampai pada posisi tertentu.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan (*street level bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi, komunikasi yang disampaikan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka akan dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas kepentingan kejelasan dalam komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan tidak bisa diabaikan. Pesan kebijakan haruslah mudah dipahami dan tidak ambigu agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan tepat. Jika informasi tidak jelas, implementasi kebijakan dapat terhambat dan tujuan yang diinginkan sulit dicapai. Selain itu, konsistensi dalam komunikasi juga memiliki peranan penting. Komunikasi yang konsisten dan jelas membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dengan baik. Perubahan yang terlalu sering dalam pesan atau perintah kebijakan dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan memperhatikan

transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi, implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung dapat menjadi lebih efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaksana kebijakan akan membantu mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efisiensi perbaikan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimana baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Menurut Edward III Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel sumberdaya tersebut yaitu:

- a. Staf. Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf atau sumber daya manusia. diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi atau memadai dan bahkan tidak berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi. Pada implementasi kebijakan publik, informasi terbagi menjadi dua bagian, pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Kedua

- informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Wewenang juga dapat membuat legitimasi para implementator dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. George C. Edward III (dalam Widodo 2015: 102-103) menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.
 - d. Fasilitas. Fasilitas fisik diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang kompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal untuk menjalankan tugasnya, tidak akan berhasil jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya memiliki staf yang terampil, informasi yang cukup, wewenang yang jelas, dan fasilitas yang memadai untuk keberhasilan suatu kebijakan. Kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat terjadi jika tidak ada cukup sumber daya manusia yang berkualitas atau jika informasi yang diperlukan tidak tersedia. Wewenang yang jelas memberikan kepercayaan kepada pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Selain itu, fasilitas fisik yang memadai juga penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan memperhatikan sumber daya ini, implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Sikap (disposisi)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin terlaksana dengan efektif, maka implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi memiliki kemampuan melaksanakannya. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, dalam Widodo 2015: 104). Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Variabel disposisi menurut Edward III antara lain, yaitu:

- a. Efek Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. insentif, untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah yang

baik dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung, sangat penting untuk memiliki para pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan dedikasi terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, pengaturan birokrasi yang memperhatikan kemampuan dan kompetensi staf juga menjadi faktor penting. Penggunaan insentif yang tepat juga dapat menjadi motivasi bagi para pelaksana kebijakan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

3. Struktur birokrasi

Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan

baik. Terdapat dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu:

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktifitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa bahwa implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung memerlukan strategi yang tepat. Pertama, diperlukan pengembangan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang fleksibel agar para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas mereka dengan efisiensi dan sesuai standar. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, fragmentasi dalam struktur birokrasi juga perlu dilakukan. Dengan membagi tanggung jawab dan kegiatan ke unit kerja yang sesuai dengan bidangnya, implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan ahli di bidangnya. Ini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan memastikan pengelolaan yang baik untuk setiap aspek kebijakan. Dengan mempertimbangkan kedua langkah tersebut, implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung dapat berjalan lebih lancar dan efektif. *Standar Operating Procedures* yang fleksibel akan membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sementara fragmentasi dalam struktur birokrasi akan

memastikan tanggung jawab dan kegiatan dikelola dengan baik oleh unit kerja yang kompeten.

2.1.2 Pemerintah & Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan merujuk pada entitas dan proses yang terkait dalam mengelola suatu negara atau wilayah dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, menyediakan pelayanan publik, dan membuat kebijakan. Pemerintah mengacu pada badan atau kelompok individu yang memiliki kekuasaan eksekutif dan administratif untuk mengelola urusan publik. Pemerintahan mencakup keseluruhan sistem, struktur, dan proses yang terlibat dalam pengelolaan negara, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, mekanisme pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam kata lain, pemerintah adalah badan yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan, sementara pemerintahan mencakup seluruh sistem dan mekanisme yang mengatur cara negara atau wilayah dikelola secara efektif. Pemerintahan melibatkan interaksi antara berbagai lembaga, aktor, dan proses yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan negara. Adapun menurut Surbakti sebagai berikut:

“Menurut Surbakti menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda makna, Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.” (Surbakti, 1992:168).

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki makna yang berbeda. Menurutnya, pemerintahan merujuk pada aspek tugas dan kewenangan yang terkait dengan mengatur negara. Sementara itu, pemerintah mengacu pada entitas atau aparat yang bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas dan kewenangan negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintahan mencakup semua tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang terkait dengan mengatur negara, termasuk perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Di sisi lain, pemerintah adalah kelompok atau organisasi yang memiliki peran untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam praktiknya, seperti presiden, menteri, pejabat, dan badan-badan pemerintah lainnya. Adapun menurut Bagir Manan yaitu:

“Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara”. (Manan, 2001:101)

Berdasarkan pendapat di atas terlihat bahwa Pemerintahan dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua elemen yang merupakan bagian dari struktur negara, termasuk cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta entitas lain yang beroperasi atas nama negara. Dalam arti sempit, pemerintahan merujuk pada lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi negara. Adapun definisi Pemerintah menurut Miriam Budiarjo yaitu

“pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. (Miriam Budiarjo, 2003:21)”

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah meliputi segala kegiatan yang terorganisir dan memiliki sumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, yang dilandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk mewujudkan negara sesuai dengan konsep dasar negara yang dipegang. Definisi diatas menekankan bahwa pemerintah merupakan badan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti pembuatan kebijakan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak rakyat. Sedangkan Talizidhuhu Ndraha mengatakan bahwa:

“Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan *public* dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. (Talizidhuhu Ndraha, 2003:6).”

Berdasarkan pendapat diatas bahwa Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memproses dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hubungan dengan pemerintahan. Setiap individu dalam masyarakat berhak menerima pelayanan sipil sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Adapun definisi Pemerintah menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003:135) yaitu:

“pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia

juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. (Inu Kencana Syafie, 2003:135)”

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pemerintah dapat dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan tindakan manusia. Dalam konteks ini, pemerintah juga bisa dianggap sebagai entitas yang mirip dengan perusahaan besar yang mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Menurut Bayu Surya Ningrat mengungkapkan pengertian pemerintah yaitu:

“Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah (Surya Ningrat 1992:11).”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan dan pemerintah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dan bahwa pemerintahan harus memiliki kekuasaan yang sah dan wewenang yang jelas untuk menjalankan tugasnya. Adapun menurut Nurmi Chatim mendefinisikan Pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit yaitu:

"Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah. (Nurmi Chatim, 2006:48)"

Memperhatikan uraian teori di atas, Pemerintahan memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara, termasuk tugas legislatif dan

yudikatif. Kedua, pengertian yang sempit hanya mengacu pada kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh presiden, menteri, dan birokrasi. Dengan kata lain, pemerintahan tidak hanya terbatas pada presiden dan menteri, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan. Memahami perbedaan ini membantu kita mengerti cakupan dan tanggung jawab pemerintah dalam berbagai situasi, serta bagaimana hubungan antara berbagai organ pemerintahan yang terlibat. Adapun menurut Yusri Munaf mengungkapkan pengertian pemerintahan yaitu:

“ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik, alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah Negara. (Yusri Munaf, 2016:48)”

Berdasarkan definisi diatas, bahwa ilmu pemerintahan adalah bidang studi yang berfokus pada analisis dan pemahaman tentang proses politik dalam sebuah masyarakat dan bagaimana nilai-nilai otoritatif dialokasikan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ilmu pemerintahan membahas berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan, termasuk struktur dan fungsi pemerintah, proses pembuatan keputusan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui studi ilmu pemerintahan, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berlangsung dalam suatu negara dan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Respon Masyarakat

A. Respon

Respon merujuk pada tindakan atau tanggapan seseorang atau kelompok terhadap suatu situasi, peristiwa, atau stimulus tertentu. Respon dapat berupa reaksi

fisik, emosional, atau perilaku yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan atau situasi tertentu. Adapun menurut Djalaludin Rakhmat tentang respon yaitu:

“Respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Jalaludin Rahmat., 1999: 51).”

Berdasarkan definisi di atas, bahwa Respon merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisme sebagai tanggapan terhadap suatu rangsangan atau perangsang. Tindakan ini tidak terbatas pada reaksi positif semata, melainkan mencakup setiap bentuk aktivitas yang dihasilkan oleh stimulus tertentu. Dalam arti yang lebih luas, respon atau tanggapan juga dapat didefinisikan sebagai hasil atau efek yang muncul setelah melakukan pengamatan terhadap suatu subjek, peristiwa, atau hubungan. Efek tersebut muncul ketika informasi yang diperoleh dari pengamatan dianalisis dan pesan-pesan yang terkandung diinterpretasikan. Jadi, respon melibatkan reaksi atau hasil yang timbul sebagai akibat dari rangsangan atau peristiwa tertentu, serta interpretasi terhadap informasi yang diambil dari pengalaman atau observasi. Adapun definisi respon menurut Menurut Soenarjo yaitu:

“Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang

dilancarkan oleh komunikator (Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, 1983: 25).”

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa dalam konteks komunikasi, istilah respon merujuk pada hasil atau dampak yang diharapkan terjadi setelah terjadinya interaksi komunikasi. Respon ini merupakan akibat dari komunikasi yang telah dilakukan, dan sering kali disebut sebagai efek dari komunikasi tersebut. Dalam sebuah kegiatan komunikasi, terdapat pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Respon merujuk pada reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan sebagai hasil dari pesan yang telah diterimanya. Dengan kata lain, setelah menerima pesan dari komunikator, penerima memberikan respon sebagai respons terhadap informasi yang diterimanya. Konsep respon dalam komunikasi penting karena mengukur efektivitas dari pesan yang disampaikan. Apakah tujuan komunikasi tercapai atau tidak dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh penerima pesan. Respon dapat berupa tindakan, pendapat, emosi, atau perubahan perilaku yang muncul sebagai dampak dari komunikasi. Dengan memahami respon yang dihasilkan oleh komunikasi, komunikator dapat menilai sejauh mana pesan telah berhasil mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Adapun definisi respon menurut Ahmad Subandi sebagai berikut:

“Respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi (Ahmad Subandi, 1982:50).”

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka akan menetralkan kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

B. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Adapun definisi lain menurut Koentjaraningrat:

“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).”

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa masyarakat adalah entitas kompleks yang terdiri dari individu-individu manusia yang berhubungan satu sama lain dalam suatu pola yang telah ditetapkan berdasarkan tradisi dan kebiasaan tertentu. Mereka saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah ada, membentuk suatu sistem yang berkelanjutan. Bagian penting dari keberlanjutan ini adalah adat istiadat yang diikuti oleh masyarakat, yang menjadi landasan untuk interaksi mereka. Selain itu, masyarakat juga memiliki dimensi waktu yang berlanjut, di mana interaksi dan adat istiadat terus berlangsung dari masa ke masa. Keempat ciri ini, yakni interaksi antar individu, adat istiadat yang diwariskan, kontinuitas dalam perjalanan waktu, dan ikatan emosional yang menghasilkan identitas bersama, membentuk esensi masyarakat sebagai entitas hidup yang kompleks dan terikat oleh

hubungan yang beragam dan rasa persatuan yang kuat. Adapun definisi masyarakat menurut Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22) yaitu:

"Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22)"

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa masyarakat adalah sebuah entitas kompleks yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling terhubung. Ia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mencakup beragam kebiasaan dan norma, prosedur dan aturan yang mengatur interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda, serta hierarki dan kolaborasi yang memandu perilaku manusia. Pada intinya, masyarakat mewakili sebuah struktur kehidupan bersama yang terbentuk dalam kurun waktu yang lama, menghasilkan tradisi dan budaya yang membentuk pola-pola hidup tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi panggung di mana norma-norma, nilai-nilai, dan cara hidup yang berbeda mengalir dan saling mempengaruhi, membentuk jalinan kompleks yang mencerminkan evolusi sosial manusia. Adapun definisi masyarakat menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) yaitu:

"Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22)"

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa Masyarakat merupakan entitas kompleks yang terbentuk oleh kelompok manusia yang telah bersama-sama hidup dan berinteraksi dalam periode waktu yang cukup lama. Interaksi yang berlangsung ini memungkinkan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengembangkan pandangan mereka tentang diri sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki batas-batas yang jelas. Definisi ini menyoroti pentingnya faktor waktu dalam pembentukan masyarakat, di mana melalui waktu, mereka mengembangkan struktur dan norma yang membantu mereka dalam koordinasi dan interaksi sehari-hari.

2.1.4 Infrastruktur Ketenagalistrikan

A. Infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005),

“Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayananpelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005)”

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa infrastruktur merupakan sekelompok fasilitas fisik yang dibangun atau diperlukan oleh pihak pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, seperti menyediakan pasokan air, listrik, penanganan limbah, sistem transportasi, dan layanan serupa. Tujuan utama dari infrastruktur ini adalah untuk membantu mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini berperan penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari kita, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan definisi lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, Jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup :

- 1) Infrastruktur transportasi;
- 2) Infrastruktur jalan;
- 3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 4) Infrastruktur air minum;
- 5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- 6) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
- 7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- 8) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- 9) Infrastruktur ketenagalistrikan;
- 10) Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- 11) Infrastruktur konservasi energi;
- 12) Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- 13) Infrastruktur fasilitas pendidikan;

- 14) Infrastruktur fasilitas sarana & prasarana olahraga, serta kesenian;
- 15) Infrastruktur kawasan;
- 16) Infrastruktur pariwisata;
- 17) Infrastruktur kesehatan;
- 18) Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
- 19) Infrastruktur perumahan rakyat.

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa Infrastruktur merupakan segala fasilitas teknis dan fisik, seperti sistem, perangkat keras, serta perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Infrastruktur juga berperan dalam membangun dan menjaga koneksi serta kerangka struktur yang mendukung agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat berjalan secara lancar. Ini mencakup berbagai elemen penting seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas komunikasi. Infrastruktur yang baik memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan komunitas dan membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas ekonomi dan perkembangan sosial yang positif.

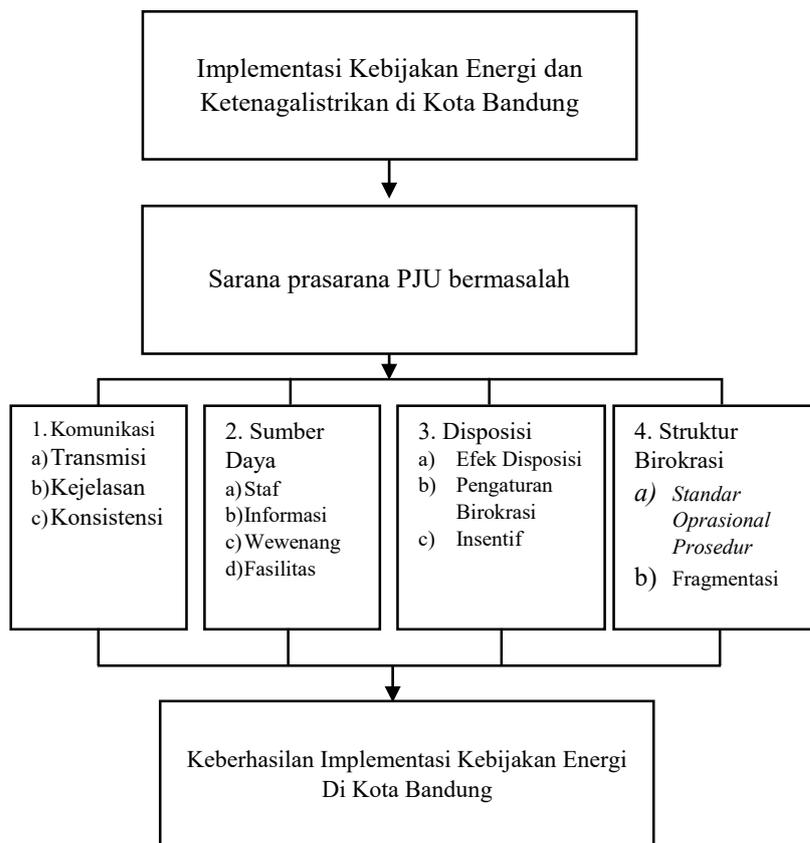
B. Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Sedangkan tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakai. Sedangkan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan merupakan tindakan untuk menerapkan dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan energi pada suatu wilayah atau negara. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung mencakup adanya laporan dari masyarakat mengenai tidak berfungsinya lampu penerangan jalan utama di beberapa lokasi di Kota Bandung serta masalah internal dari pihak implementornya. Berikut ini merupakan bagan yang telah di modifikasi dari kerangka teori di atas:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



(Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2023)

2.3 Proposisi

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi pada penelitian ini adalah Kebijakan Tentang Energi Dan Ketenagalistrikan Di Kota Bandung (Suatu Studi Respon Masyarakat Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan) akan berhasil ditentukan oleh aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.